

# Konsep dan Pengukuran Pembangunan Ekonomi

Prof. Lincoln Arsyad, Ph.D.



## PENDAHULUAN

---

Modul 1 ini merupakan pengantar bagi mahasiswa untuk mempelajari masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang (NSB). Pada modul ini dijelaskan sejarah perkembangan perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi, karakteristik umum negara-negara sedang berkembang serta permasalahan yang mereka hadapi, dan bagaimana mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara.

Setelah mempelajari modul ini, secara umum Anda diharapkan dapat menjelaskan perkembangan perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi, cakupan ekonomi pembangunan, karakteristik umum negara sedang berkembang, dan ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan.

Setelah mempelajari modul ini, secara khusus Anda dapat menjelaskan:

1. perkembangan perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi;
2. evolusi fokus dari ekonomika pembangunan;
3. cakupan bahasan ekonomi pembangunan;
4. dasar pengelompokan negara dan karakteristik umum negara sedang berkembang;
5. perbedaan pengertian antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi;
6. ukuran-ukuran pembangunan ekonomi;
7. kekuatan dan kelemahan pendekatan per kapita sebagai indikator pembangunan;
8. berbagai indikator pembangunan lainnya, seperti Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Ruang Lingkup dan Nilai Pokok Pembangunan

### A. PERKEMBANGAN PERHATIAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi bukanlah sebuah topik baru dalam ilmu ekonomi karena studi tentang pembangunan ekonomi telah menarik perhatian para ekonom sejak zaman Merkantilis, Klasik, sampai Marx dan Keynes. Bapak ilmu ekonomi, Adam Smith misalnya, telah menyinggung berbagai aspek tentang pembangunan ekonomi dalam karya fenomenalnya yang berjudul *The Wealth of Nations* (1776). Oleh karena itu, tidaklah tepat kalau kita menganggap bahwa ekonomi pembangunan merupakan suatu bidang analisis yang relatif baru dalam ilmu ekonomi. Akan lebih tepat jika kita mengatakan bahwa analisis-analisis tentang masalah pembangunan yang dilakukan oleh para ekonom sekarang ini merupakan suatu “kebangkitan kembali” untuk memperhatikan masalah-masalah yang dianalisis oleh para ekonom terdahulu.

Masa “kebangkitan kembali” terhadap masalah-masalah pembangunan ekonomi ini dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua (PD II) karena setelah zaman Adam Smith sampai PD II perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi sangatlah kurang. Kurangnya perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain *pertama*, pada masa sebelum PD II sebagian besar negara-negara sedang berkembang (NSB) masih merupakan negara jajahan. Para penjajah merasa tidak perlu untuk memikirkan secara serius mengenai masalah pembangunan di negara jajahan mereka. Tujuan mereka mencari negara-negara jajahan adalah hanya untuk menciptakan keuntungan bagi mereka, bukan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan negara-negara jajahannya tersebut.

*Kedua*, kurangnya usaha dan perhatian dari para pemimpin masyarakat negara-negara jajahan untuk membahas masalah-masalah pembangunan ekonomi. Pada saat itu, mereka hanya memikirkan tentang bagaimana caranya untuk meraih kemerdekaan dari belenggu tirani penjajah. Menurut mereka, pembangunan ekonomi hanya bisa dilakukan jika penjajahan telah

berakhir. *Ketiga*, di lingkungan para ekonom sendiri, penelitian dan analisis mengenai masalah pembangunan ekonomi masih terbatas. Para ekonom Barat pada masa itu lebih memusatkan perhatian pada bagaimana mengatasi masalah-masalah ekonomi jangka pendek, seperti kemelesetan ekonomi dan pengangguran karena selama tiga dekade awal abad ke-20, masalah depresi (*malaise*) dan pengangguran merupakan masalah utama yang dihadapi dunia.

Namun, kini setelah PD II berakhir perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi tumbuh dengan pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, berkembangnya cita-cita negara-negara yang baru merdeka untuk dapat mengejar ketertinggalan mereka dalam bidang ekonomi dari negara-negara maju. Negara-negara yang baru merdeka relatif miskin dan juga mengalami masalah kependudukan yang kronis. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan sesuatu hal yang sangat mendesak untuk segera dilakukan dalam rangka menanggulangi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Kedua*, berkembangnya perhatian negara-negara maju terhadap usaha pembangunan (khususnya pembangunan ekonomi) di NSB. Fenomena ini didorong oleh rasa kemanusiaan negara-negara maju untuk membantu NSB dalam mengakselerasi laju pembangunan ekonomi mereka agar dapat mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara maju. Selain itu, ada juga pertimbangan lain yaitu untuk mendapat dukungan dalam perang ideologi antara Blok Barat dengan Blok Timur pada masa itu.

Bantuan dari negara-negara maju tersebut sifatnya bermacam-macam, misalnya hibah (*grant*), yang berarti NSB yang menerimanya tidak perlu membayar kembali bantuan tersebut. Bantuan tersebut bentuknya, antara lain dapat berupa bantuan teknik dan tenaga ahli, bantuan bahan makanan, obat-obatan ataupun bantuan untuk melakukan studi kelayakan suatu proyek. Bantuan lainnya biasanya berupa pinjaman (*loan*) dengan syarat-syarat yang jauh lebih mudah dengan tingkat bunga yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan pinjaman komersial biasa.

## **B. EVOLUSI FOKUS EKONOMI PEMBANGUNAN**

Pada akhir dekade 1940-an, ekonomi pembangunan menjadi bidang kajian yang paling sering dibahas, seiring dengan terbebasnya banyak negara di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin dari belenggu penjajahan, dan adanya keinginan dari negara-negara tersebut untuk mengejar

ketertinggalannya dari negara-negara maju. Selama dekade 1950-an hingga awal dekade 1960-an, kebijakan-kebijakan pembangunan ditekankan pada maksimisasi pertumbuhan GNP melalui proses akumulasi modal dan industrialisasi. Kebijakan-kebijakan yang diambil antara lain menerapkan sistem perencanaan terpusat untuk pertumbuhan investasi modal fisik, pemanfaatan surplus tenaga kerja, pengembangan industri substitusi impor (ISI), dan mencari bantuan luar negeri. Dengan kata lain, strategi pembangunan berpusat pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang lainnya diarahkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi dan mengikuti irama pembangunan di bidang ini.

Kenyataannya, strategi ini dihadapkan pada pilihan antara pertumbuhan ekonomi atau pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua kutub strategi pembangunan yang saling mengabaikan (*trade-off*). Artinya, pembangunan yang menitikberatkan pada aspek pertumbuhan dalam batas-batas tertentu akan mengabaikan aspek pemerataan, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan pengalaman masa lalu, pilihan pun jatuh pada aspek pertumbuhan sehingga kebijakan pembangunan yang diambil sangat menekankan pada pemacuan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan nantinya aspek pemerataan dapat pula diraih melalui mekanisme tetesan ke bawah (*trickle down effect*).

Namun, keberhasilan pembangunan yang ditinjau dari tolok ukur ekonomi klasik tersebut sekiranya tidak mampu merefleksikan realitas kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Angka-angka yang tercermin pada GNP tidak cukup representatif dalam mengungkapkan *state of mind* masyarakat yang sebenarnya. Hal tersebut ditunjukkan oleh semakin lebarnya jurang polarisasi ekonomi seiring dengan pesatnya pertumbuhan.

Pada masa itu, banyak di antara negara yang baru merdeka (NSB) terlahir dalam tatanan konfigurasi ekonomi yang suram. Hal tersebut diindikasikan oleh angka pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, sedangkan angka inflasi tidak terkendali. Konfigurasi yang ekonomi yang suram tersebut tidak memberikan batas toleransi yang luas bagi para pembuat kebijakan di negara terkait untuk berbuat kesalahan. *Margin of error* yang demikian sempit, tidak memberikan ruang gerak yang cukup untuk memilih berbagai alternatif model pembangunan, kecuali hanya bertumpu pada paradigma pertumbuhan yang konsekuensinya sering kali mengabaikan aspek-aspek sosial dan budaya.

Memasuki dekade 1960-an akhir dan awal dekade 1970-an, pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Mulai muncul pandangan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi bukan lagi menitikberatkan pada aspek pertumbuhan, namun bagaimana mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Beberapa ekonom berpendapat bahwa pertumbuhan yang tercermin pada kenaikan angka-angka GNP tiap tahunnya belum mampu menjadi solusi atas masalah kemiskinan dan ketimpangan sehingga “makna” pembangunan kembali dipertanyakan.

Adanya keprihatinan di kalangan para pemerhati masalah-masalah pembangunan memunculkan gagasan baru tentang strategi pembangunan yang lebih memberikan “makna” bagi semua pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*). Bank Dunia memperkenalkan pendekatan pembangunan **pertumbuhan dengan pemerataan** (*redistribution with growth*) dan ILO (*International Labour Organization*) menawarkan **pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar** (*basic need approach*) sebagai solusi. Untuk literatur pembangunan lainnya ada yang menekankan perlunya pergeseran orientasi dari pembangunan industri menuju pembangunan perdesaan; pergeseran penekanan dari pembentukan modal fisik menuju pembentukan modal insani (*human capital*) sebagai modal utama pembangunan; dan pentingnya penerapan teknologi tepat guna (*appropriate technology*) bagi setiap negara.

Perubahan yang paling mendasar pada ekonomi pembangunan terjadi selama dekade 1970-an dan dekade 1980-an yang dikenal dengan istilah ‘kebangkitan ekonomi neoklasik’ (*resurgence of neoclassical economics*). Jika pada dekade 1950-an para ekonom pembangunan merumuskan teori pembangunan yang dianggap berlaku umum (*grand theories*) dan strategi-strategi yang bersifat umum di dalam upaya memecahkan permasalahan NSB, pada dekade 1970-an dan 1980-an sebaliknya. Fokus kajian ekonomi pembangunan sudah lebih ditekankan pada analisis tentang keberagaman NSB dan pengidentifikasian faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan kinerja ekonomi setiap negara. Analisis berubah dari model pertumbuhan yang sangat agregatif menuju ke model mikro yang disagregatif. Studi diarahkan pada kekhususan karakteristik suatu negara berdasarkan data dan kondisi empiris negara tersebut dan pentingnya penggunaan asumsi yang berbeda ketika menganalisis masalah di suatu NSB. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian di dalam proses pengidentifikasian hubungan-hubungan kelembagaan dan menempatkan elemen-elemen misalnya penduduk, institusi, dan ketersediaan semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang selama

ini dianggap *given* sebagai variabel endogen di dalam analisis pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional yang juga mencakup perubahan-perubahan mendasar di dalam struktur sosial, perilaku masyarakat, perbaikan sistem kelembagaan (*institutional development*), selain aspek-aspek ekonomi, seperti kenaikan pendapatan per kapita, pemerataan distribusi pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.

### C. CAKUPAN BAHASAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Usaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh NSB dalam pelaksanaannya banyak mengalami kegagalan dalam memecahkan masalah-masalah mendasar dari pembangunan, misalnya masalah kemiskinan dan masalah kesenjangan distribusi pendapatan. Kegagalan-kegagalan tersebut telah menimbulkan dorongan bagi para ilmuwan, terutama para ekonom, untuk memperdalam pengetahuan mereka mengenai masalah yang memengaruhi kehidupan sebagian besar umat manusia di bumi ini. Sejak saat itu, aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi telah menjadi titik perhatian yang sering dibahas oleh para ekonom.

Pandangan-pandangan para ekonom mengenai aspek yang berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan di NSB itulah yang kini kita kenal sebagai ekonomi pembangunan. Namun, pola pembahasan yang seragam seperti dalam analisis ekonomi mikro dan ekonomi makro tidak akan kita temui dalam analisis ekonomi pembangunan. Cabang ilmu ekonomi ini belum memiliki suatu pola analisis tertentu yang dapat diterima secara umum.

Belum adanya suatu pola analisis yang dapat diterima secara umum disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain *pertama*, kompleksitas masalah pembangunan dan banyaknya faktor yang memengaruhi pembangunan, yang mengakibatkan melebarnya topik pembahasan di dalam ekonomi pembangunan. Ada beberapa pembahasan dalam ekonomi pembangunan, antara lain masalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pembentukan modal, tingkat tabungan domestik, transformasi struktural, dan bantuan luar negeri. *Kedua*, tidak adanya teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar yang berlaku umum (*grand theory*) dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi. Hingga saat ini, masih terjadi silang pendapat di

antara para ekonom mengenai faktor-faktor apa yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan bagaimana mekanisme proses pembangunan ekonomi itu berlangsung.

Namun, hal tersebut tidak berarti karakteristik pola analisis dalam ekonomi pembangunan tidak dapat kita kenali. Jika kita cermati, pada hakikatnya pembahasan-pembahasan dalam ekonomi pembangunan dapat dimasukkan ke dalam dua kelompok. **Kelompok pertama** adalah pembahasan mengenai pembangunan ekonomi, baik yang bersifat deskriptif maupun analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik perekonomian dan masyarakat NSB serta implikasinya pada pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. **Kelompok kedua** adalah pembahasan mengenai berbagai pilihan orientasi kebijaksanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam upaya untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di NSB. Oleh karena itu, Ekonomi Pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh NSB dan memberikan landasan teori bagaimana cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar NSB dapat membangun ekonominya secara cepat dan berkelanjutan (*sustainable*).



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan perkembangan perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi!
- 2) Jelaskan evolusi fokus ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Perkembangan perhatian terhadap pembangunan ekonomi sebelum PD II sangat kurang karena *Pertama*, pada masa sebelum PD II sebagian besar negara-negara sedang berkembang (NSB) masih merupakan negara jajahan. *Kedua*, kurangnya usaha dan perhatian dari para pemimpin masyarakat negara-negara jajahan untuk membahas masalah-masalah

pembangunan ekonomi. *Ketiga*, di lingkungan para ekonom, penelitian dan analisis mengenai masalah pembangunan ekonomi masih terbatas. Setelah PD II perkembangan perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi sangat tinggi.

- 2) Pada dekade 1950-an hingga awal dekade 1960-an, kebijakan-kebijakan pembangunan diarahkan untuk memaksimalkan pertumbuhan GNP melalui proses akumulasi modal dan industrialisasi. Memasuki dekade 1960-an akhir dan awal dekade 1970-an, kebijakan pembangunan lebih ditekankan pada pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan secara langsung melalui pendekatan pemerataan dengan pertumbuhan (*redistribution with growth*) dan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*). Pada dekade 1970-an dan dekade 1980-an mulai disadari adanya keberagaman NSB dan perbedaan kinerja perekonomian setiap negara sehingga analisis bergerak dari model pertumbuhan yang sangat agregatif menuju ke model mikro yang terdisagregatif. Studi diarahkan pada kekhususan karakteristik suatu negara berdasarkan data empiris dan harus ada penggunaan asumsi yang berbeda ketika menganalisis masalah di suatu NSB. Oleh karena itu, hubungan-hubungan kelembagaan dan elemen-elemen misalnya penduduk, institusi, dan ketersediaan semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*), yang selama ini dianggap sebagai hal *given* perlu dimasukkan menjadi variabel endogen di dalam analisis pembangunan.



## RANGKUMAN

---

Perkembangan perhatian terhadap pembangunan ekonomi sebelum PD II sangat kurang karena pada masa itu sebagian besar NSB masih dijajah, kurangnya usaha dan perhatian dari para pemimpin masyarakat negara-negara jajahan untuk membahas masalah-masalah pembangunan ekonomi, dan terbatasnya studi dan analisis tentang masalah pembangunan jangka panjang. Pada 1950-an hingga awal 1960-an, kebijakan-kebijakan pembangunan diarahkan untuk memaksimalkan pertumbuhan *growth-oriented strategy* (GNP). Memasuki akhir dekade 1960-an dan awal 1970-an, upaya pembangunan ekonomi ditekankan pada upaya pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan secara langsung melalui, misalnya pendekatan pemerataan dengan pertumbuhan dan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pada dekade 1970-an dan dekade 1980-an muncul kesadaran akan adanya keberagaman NSB dan kinerja perekonomiannya. Analisis bergerak dari model pertumbuhan yang sangat agregatif menuju ke model mikro yang disagregatif. Pembangunan ekonomi mulai memperhatikan hubungan-hubungan kelembagaan di dalam menelaah arti penting beberapa variabel kuantitatif dan memperhatikan beberapa elemen, seperti penduduk, institusi, dan pasokan kewirausahaan sebagai variabel endogen dalam analisis pembangunan.

Cakupan bahasan ekonomi pembangunan dapat dimasukkan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah pembahasan mengenai pembangunan ekonomi, baik yang bersifat deskriptif maupun analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai karakteristik perekonomian dan masyarakat di NSB serta implikasinya pada pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Kelompok kedua adalah pembahasan mengenai berbagai pilihan orientasi kebijaksanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam upaya untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di NSB.



#### TES FORMATIF 1

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Sebelum Perang Dunia II (PD II) perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi sangatlah kurang. Faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut, *kecuali* ....
  - A. kurangnya usaha para pemimpin masyarakat yang dijajah untuk membahas masalah-masalah pembangunan ekonomi
  - B. sebelum PD II sebagian besar NSB masih merupakan daerah jajahan
  - C. para ekonom dan peneliti tentang masalah pembangunan ekonomi masih terbatas
  - D. berkembangnya perhatian negara maju terhadap usaha pembangunan
  
- 2) Fokus perhatian ekonomi pembangunan sejak dekade 1900-an sampai sekarang ini adalah ....
  - A. proses akumulasi modal dan bantuan luar negeri
  - B. strategi pemenuhan kebutuhan pokok
  - C. pembangunan sistem kelembagaan
  - D. pembangunan perdesaan

- 3) Dilihat dari istilahnya Ekonomi Pembangunan adalah ....
- A. sebuah ilmu yang tunggal sehingga tidak perlu memasukkan pendekatan ilmu lain yang terkait
  - B. sebuah ilmu yang tunggal sehingga tidak perlu ditopang dengan metodologi keilmuan
  - C. sebuah ilmu yang transparan sehingga tidak mungkin akan diperoleh kesempurnaan dalam analisisnya
  - D. sebuah ilmu yang menggunakan pendekatan multidisiplin karena menyangkut berbagai aspek kehidupan yang saling terkait satu sama lain
- 4) Tidak termasuk bidang penting yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan, adalah ....
- A. masalah pertumbuhan ekonomi dan investasi
  - B. masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan
  - C. masalah pembentukan modal
  - D. analisis makro dan mikro
- 5) Jika dicermati lebih teliti, pada hakikatnya pembahasan-pembahasan dalam ekonomi pembangunan dapat dimasukkan dalam beberapa kelompok ....
- A. kelompok pembahasan mengenai perkembangan ekonomi baik yang deskriptif maupun yang analitis yang menggambarkan sifat perekonomian dan masyarakat di negara maju serta implikasinya
  - B. kelompok sejarah negara-negara yang maju maupun berkembang, termasuk sejarah dalam melepaskan dari cengkeraman penjajah
  - C. kelompok yang bersifat memberikan berbagai pilihan kebijaksanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam upaya mempercepat proses perkembangan ekonomi di NSB
  - D. kelompok yang bersifat menerima berbagai pilihan dalam upaya mempercepat proses pembangunan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Pengelompokan dan Ciri-ciri Negara Sedang Berkembang

### A. PENGELOMPOKAN NEGARA SEDANG BERKEMBANG (NSB)

Pengelompokan negara-negara di dunia biasanya berdasarkan pada tingkat kesejahteraannya dengan menggunakan indikator pendapatan riil per kapita. Berdasarkan tingkat kesejahteraan tersebut, Bank Dunia mengelompokkan negara-negara di dunia menjadi dua, yaitu negara-negara maju (*developed countries*) dan negara-negara sedang berkembang (*developing countries* atau sering juga disebut *less-developed countries*). Negara-negara sedang berkembang ini sering juga disebut sebagai negara Dunia Ketiga atau Negara Selatan. Negara-negara yang termasuk dalam kelompok negara-negara maju yang sering juga disebut sebagai negara Dunia Pertama adalah negara-negara di kawasan Eropa Barat, Amerika Utara, Australia, New Zealand, dan Jepang. Selain itu, yang juga termasuk dalam kelompok negara-negara maju adalah sebagian besar negara-negara sosialis yang terdapat di kawasan Eropa Timur, seperti Rusia, Hongaria, Bulgaria, dan Polandia. Negara-negara ini sering disebut sebagai negara Dunia Kedua.

Sebagian besar NSB terdapat di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin, suatu kawasan di mana diperkirakan dua pertiga penduduk dunia berada. Taraf pembangunan mereka masih rendah dan juga banyak di antara mereka yang memiliki pendapatan per kapita kurang dari US \$1.000 (Bank Dunia, 2006). Nilai tersebut tentu saja sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang sebagian besar memiliki pendapatan per kapita di atas US \$10.000.

Bank Dunia (2006) menyebutkan bahwa ada beberapa NSB yang mempunyai pendapatan per kapita di atas US \$10.000 bahkan setara dengan pendapatan per kapita negara-negara maju, misalnya Korea Selatan (US \$14,000), Kuwait (US \$22,470), Arab Saudi (US \$10,140) dan Singapura (US \$24,760). Namun, negara-negara tersebut belum dianggap sebagai kelompok negara-negara maju karena struktur ekonomi dan masyarakatnya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan NSB lainnya. Menurut Celso Furtado (1964) seorang ekonom Amerika Latin di dalam Arsyad (1999),

suatu negara masih disebut sebagai negara yang belum maju (*underdeveloped*) atau NSB jika di negara tersebut masih terjadi ketidakseimbangan antara jumlah faktor produksi yang dimiliki dengan teknologi yang mereka kuasai sehingga penggunaan modal dan tenaga kerja secara penuh (*full utilization*) belum tercapai.

Satu-satunya negara di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang pada mulanya dianggap sebagai NSB, tetapi kini dianggap sebagai negara maju adalah Jepang. Belakangan ini juga muncul beberapa negara yang mempunyai taraf pembangunan yang hampir mencapai taraf negara-negara maju, seperti Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Hongkong. Mereka sering disebut sebagai *Newly Industrializing Countries (NICs)*.

Bank Dunia dalam *World Development Indicators* (2006) mengklasifikasikan 3 kelompok negara berdasarkan tingkat pendapatan nasional (*Gross National Income* = GNI) per kapitanya sebagai berikut:

- a. Negara berpenghasilan rendah (*low-income economies*) adalah kelompok negara-negara dengan GNI per kapita di bawah US \$765.
- b. Negara berpenghasilan menengah (*middle-income economies*) adalah kelompok negara-negara dengan GNI per kapita antara US \$766 sampai US\$9.385. Kelompok negara berpenghasilan menengah dapat diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
  - 1) Negara berpenghasilan menengah ke bawah (*lower-middle-income economies*) adalah suatu negara dengan GNI per kapita antara US \$766 sampai US \$3.035.
  - 2) Negara berpenghasilan menengah ke atas (*upper-middle-income economies*) adalah suatu negara dengan GNI per kapita antara US \$3.036 sampai US \$9.385.
- c. Negara berpenghasilan tinggi (*high-income economies*) adalah kelompok negara-negara dengan GNI per kapita di atas US \$9.386.

Tabel 1.1 berikut ini menyajikan beberapa kelompok negara di dunia berdasarkan tingkat pendapatan per kapita dan jumlah penduduk.

Tabel 1.1.  
Beberapa Negara Terpilih menurut GNI Per Kapita  
dan Jumlah Penduduk, 2004

| Negara                                   | GNP per Kapita (US \$) | Penduduk (juta) |
|--|------------------------|-----------------|
| Kelompok Negara Berpenghasilan Rendah:   |                        |                 |
| 1. Etiopia                               | 110(206)               | 70              |
| 2. Tanzania                              | 320(185)               | 38              |
| 3. Kenya                                 | 480(171)               | 33              |
| 4. Bangladesh                            | 440(174)               | 139             |
| 5. Vietnam                               | 540(168)               | 82              |
| Kelompok Negara Berpenghasilan Menengah: |                        |                 |
| 1. Srilangka                             | 1.010(143)             | 19              |
| 2. Indonesia                             | 1.140(137)             | 218             |
| 3. Filipina                              | 1.170(136)             | 82              |
| 4. Thailand                              | 2.490(104)             | 64              |
| 5. Malaysia                              | 4.520(79)              | 25              |
| Kelompok Negara Berpenghasilan Tinggi:   |                        |                 |
| 1. Korea Selatan                         | 14.000(50)             | 48              |
| 2. Israel                                | 17.360(39)             | 7               |
| 3. Singapura                             | 24.760(29)             | 4               |
| 4. Jepang                                | 37.050(9)              | 128             |
| 5. Amerika Serikat                       | 41.440(5)              | 294             |

Sumber: Bank Dunia (2006).

Keterangan: Angka ( ) menunjukkan peringkat di dunia.

## B. KARAKTERISTRIK UMUM NEGARA SEDANG BERKEMBANG (NSB)

Setelah kita membahas tentang pengelompokan negara-negara di dunia, sekarang saatnya kita membahas tentang sifat dan karakteristik NSB. Todaro & Smith (2003) mengemukakan beberapa karakteristik umum NSB, yaitu sebagai berikut.

### 1. Standar Hidup yang Rendah

Pada umumnya, standar hidup sebagian besar penduduk NSB sangat rendah. Standar hidup yang rendah pada NSB bukan hanya jika dibandingkan dengan standar hidup di negara-negara maju, namun juga jika dibandingkan

dengan standar hidup sekelompok kecil (*elite*) penduduk di dalam NSB itu sendiri.

Di NSB, standar hidup yang rendah itu tampak sangat nyata, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan per kapita yang rendah, kemiskinan yang kronis, kondisi perumahan yang tidak memadai, sarana kesehatan yang masih sangat terbatas, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kematian bayi yang tinggi, tingkat harapan hidup yang rendah, adanya perasaan tidak aman, dan rasa putus asa.

## 2. Tingkat Produktivitas Rendah

NSB dicirikan pula oleh tingkat produktivitas tenaga kerjanya yang rendah. Seperti kita ketahui, konsep fungsi produksi yang secara sistematis menghubungkan tingkat *output* dengan kombinasi-kombinasi input pada tingkat teknologi tertentu merupakan konsep yang paling sering digunakan untuk menjelaskan tentang cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan materinya. Namun, agar dapat memberikan sebuah penjelasan yang akurat, konsep fungsi produksi yang bersifat teknis ini perlu ditunjang oleh konseptualisasi yang luas termasuk di antaranya *input-input* lainnya, seperti motivasi pekerja, dan keluwesan kelembagaan.

Di NSB, tingkat produktivitas tenaga kerjanya (*output per pekerja*) sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Hal ini bisa dijelaskan dengan menggunakan beberapa konsep ekonomi. Salah satunya adalah prinsip produktivitas marjinal yang semakin menurun (*diminishing marginal productivity*). Prinsip ini menyatakan bahwa jika ada penambahan kuantitas pada salah satu input variabel (misalnya tenaga kerja), sedangkan kuantitas *input-input* lainnya (modal, tanah) diasumsikan tetap maka pada suatu titik tertentu produk marjinal yang dihasilkan dari adanya tambahan input variabel tersebut akan menurun. Oleh karena itu, tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah bisa disebabkan oleh tidak adanya atau kurangnya input komplementer, seperti modal fisik atau manajemen sumber daya manusia yang baik.

## 3. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Beban Tanggungan yang Tinggi

Menurut UNDP (2008), dari sekitar 6,3 miliar penduduk dunia di tahun 2003, sebagian besar (5,3 miliar) berada di NSB, sedangkan sisanya hidup di negara-negara maju. Laju pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi dan

tingkat kepadatan penduduk yang “tidak wajar”, tentu saja menambah kompleksitas permasalahan di NSB. Ada dua faktor yang memengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk suatu negara, yaitu (a) tingkat kelahiran kasar (*crude birth rate*) yang ditunjukkan oleh jumlah kelahiran per 1.000 penduduk tiap tahunnya, dan (b) tingkat kematian (*death rate*) yang ditunjukkan oleh jumlah kematian per 1.000 penduduk tiap tahunnya. Selama ini, tingkat kelahiran maupun tingkat kematian antara dua kelompok negara tersebut juga sangat timpang. Data UNDP (2005) menyebutkan bahwa hingga tahun 2003, rata-rata tingkat kelahiran kasar di NSB masih sangat tinggi, yaitu sekitar 22 kelahiran per 1.000 penduduk, sedangkan di negara-negara maju hanya sekitar 12 kelahiran per 1.000 penduduknya. Di sisi lain, tingkat kematian di NSB juga relatif lebih tinggi, yaitu sekitar 11 kematian per 1.000 penduduk, sedangkan pada negara-negara maju “hanya” mencapai angka sekitar 9 kematian per 1.000 penduduknya.

Meskipun tingkat kematian di NSB relatif lebih tinggi, namun berkat adanya perbaikan sarana dan prasarana penunjang kesehatan, sekarang perbedaan tingkat kematian antara dua kelompok negara tersebut tidak begitu besar. Sebagai dampaknya, menurut UNDP (2008), tingkat pertumbuhan penduduk antara tahun 1973–2003 di NSB adalah sebesar 1,9% per tahun, sedangkan di negara-negara maju “hanya” sekitar 0,7% per tahunnya.

Satu hal lagi yang menambah kompleksitas masalah kependudukan di NSB adalah proporsi penduduk di bawah usia 15 tahun (usia nonproduktif) yang cukup tinggi. Hal tersebut berdampak pada semakin tingginya **rasio beban tanggungan** (*burden of dependency ratio*). Menurut UNDP (2008), pada tahun 2003, proporsi penduduk di bawah usia 15 tahun di NSB adalah sebesar 31,6%, sedangkan di negara-negara maju hanya mencapai angka 18%. Dengan kata lain, rasio beban tanggungan di NSB hampir dua kali lebih besar dibandingkan rasio beban tanggungan di negara-negara maju.

#### 4. Tingginya Tingkat Pengangguran

Apabila dibandingkan dengan negara-negara maju, pemanfaatan sumber daya manusia yang dilakukan oleh NSB masih relatif rendah. Ada dua hal yang memicu timbulnya fenomena tersebut, yaitu *pertama*, adanya pengangguran terselubung (*underemployment*), artinya tenaga kerja yang ada bekerja di bawah kapasitas optimalnya. Hal ini terlihat dari banyaknya tenaga kerja di daerah perkotaan maupun perdesaan yang bekerja di bawah jam kerja normal, mereka hanya bekerja secara harian, mingguan atau musiman.

Pengangguran terselubung tersebut juga terlihat pada tenaga kerja yang bekerja penuh waktu, sesuai dengan jam kerja normal namun produktivitasnya begitu rendah sehingga adanya penambahan jam kerja tidak akan mempunyai pengaruh yang berarti terhadap jumlah *output*. *Kedua*, adanya pengangguran terbuka (*open unemployment*), artinya orang-orang yang sebenarnya mampu dan sangat ingin bekerja namun tidak ada pekerjaan yang tersedia bagi mereka. Keadaan ini menuntut penciptaan lapangan kerja baru sesuai dengan perkembangan jumlah tenaga kerja. Data Bank Dunia (2006) menyebutkan bahwa antara tahun 2000–2004 rata-rata jumlah pengangguran di NSB adalah 12% dari keseluruhan angkatan kerja, sedangkan di negara-negara maju penganggurannya “hanya” mencapai angka 5,4%.

## 5. Ketergantungan terhadap Produksi Pertanian dan Ekspor Produk Primer

Data Bank Dunia (2006) menyebutkan bahwa sebagian besar penduduk NSB hidup di daerah perdesaan. Hingga tahun 2004, perbandingan jumlah penduduk antara **desa** dan **kota** di NSB adalah 57 dan 43, sedangkan di negara-negara maju perbandingan tersebut berubah drastis menjadi 22 dan 78. Daerah perdesaan dikenal sebagai basis sektor pertanian sehingga apabila dilihat dari konsentrasi penduduknya maka dapat dikatakan bahwa 58% penduduk di NSB menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Pada periode yang sama, menurut Bank Dunia (2006), kontribusi sektor pertanian terhadap GDP di NSB adalah sekitar 12%, sedangkan di negara-negara maju hanya sekitar 2%. Di sisi lain, sepuluh tahun sebelumnya, pada tahun 1990 kontribusi sektor pertanian terhadap GDP di NSB adalah sekitar 18%, sedangkan di negara-negara maju hanya 3%. Hal tersebut menunjukkan adanya fenomena transformasi struktural, dari sektor pertanian beralih ke sektor modern.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa *meskipun sektor pertanian di NSB menyerap sebagian besar tenaga kerjanya, namun kontribusi sektor tersebut dinilai sangatlah kurang*. Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut, ada dua kebijakan yang dapat dijalankan NSB, (a) adanya revitalisasi pertanian, mengingat sektor pertanian merupakan basis perekonomian NSB; dan (b) adanya transformasi struktural yang dinamis, suatu proses transformasi yang tidak menyebabkan adanya “ketimpangan” dan “kepincangan” pada salah satu sektor.

## 6. Dominasi Negara Maju, Ketergantungan terhadap Negara Maju, dan *Vulnerabilitas* dalam Hubungan-hubungan Internasional

Bagi NSB, faktor yang menyebabkan rendahnya standar hidup, tingginya angka pengangguran, dan munculnya masalah ketidakmerataan pendapatan adalah karena tingginya ketimpangan, baik di bidang ekonomi maupun politik antara negara-negara miskin dan negara-negara kaya. Ketimpangan tersebut tidak hanya dalam bentuk dominasi negara-negara kaya dalam mengendalikan pola perdagangan internasional, namun juga tampak dalam dominasi mereka dalam mendikte NSB sebagai prasyarat dalam memberikan bantuan luar negeri maupun menyalurkan modal swastanya.

Kondisi tersebut pada akhirnya akan melahirkan sikap ketergantungan NSB terhadap negara-negara maju dan menimbulkan sifat mudah terpengaruh (*vulnerability*) dari NSB terhadap dominasi dari luar yang pada akhirnya menguasai dan mendominasi setiap sendi kehidupan ekonomi dan sosial mereka.



### LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan dasar pengelompokan negara-negara di dunia ini menurut Bank Dunia!
- 2) Jelaskan karakteristik negara-negara sedang berkembang!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Pengelompokan negara-negara di dunia berdasarkan pada tingkat kesejahteraannya dengan menggunakan indikator pendapatan riil per kapita. Berdasarkan tingkat kesejahteraan tersebut, Bank Dunia mengelompokkan negara-negara di dunia menjadi dua, yaitu negara-negara maju (*developed countries*) dan negara-negara sedang berkembang (*developing countries* atau sering juga disebut *less-developed countries*). Negara-negara maju kelompok Barat (misalnya Amerika Serikat, Eropa Barat, Kanada, dan Australia) disebut juga negara Dunia Pertama. Sementara negara-negara sedang berkembang

sering juga disebut sebagai negara Dunia Ketiga atau Negara Selatan. Selain itu, yang juga termasuk dalam kelompok negara-negara maju adalah sebagian besar negara-negara sosialis – sering juga disebut sebagai negara Dunia Kedua - yang terdapat di kawasan Eropa Timur, seperti Rusia, Hongaria, Bulgaria, dan Polandia.

- 2) Karakteristik umum negara sedang berkembang:
  - a) Standar hidup yang rendah.
  - b) Tingkat produktivitas yang rendah.
  - c) Tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi.
  - d) Tingginya tingkat pengangguran.
  - e) Ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor produk primer.
  - f) Dominasi negara maju, ketergantungan terhadap negara maju, dan *vulnerabilitas* dalam hubungan-hubungan internasional.



## RANGKUMAN

---

Bank Dunia (2006) mengelompokkan negara berdasarkan tingkat pendapatan nasional (*Gross National Income* = GNI) per kapitanya sebagai berikut.

1. Negara berpenghasilan rendah (*low-income economies*) adalah kelompok negara-negara dengan GNI per kapita di bawah US \$765.
2. Negara berpenghasilan menengah (*middle-income economies*) adalah kelompok negara-negara dengan GNI per kapita antara US \$766 sampai US \$9.385. Kelompok negara berpenghasilan menengah dapat diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
  - a. Negara berpenghasilan menengah ke bawah (*lower-middle-income economies*) adalah suatu negara dengan GNI per kapita antara US \$766 sampai US \$3.035.
  - b. Negara berpenghasilan menengah ke atas (*upper-middle-income economies*) adalah suatu negara dengan GNI per kapita antara US \$ .036 sampai US \$9.385.
3. Negara berpenghasilan tinggi (*high-income economies*) adalah kelompok negara-negara dengan GNI per kapita di atas US \$9.386.

Todaro & Smith (2003) mengemukakan karakteristik umum NSB sebagai berikut.

1. Standar hidup yang rendah yang dapat dilihat dari pendapatan per kapita yang rendah, kemiskinan yang kronis, kondisi perumahan yang tidak memadai, sarana kesehatan yang masih sangat terbatas, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kematian bayi yang tinggi, tingkat harapan hidup yang rendah, adanya perasaan tidak aman, dan rasa putus asa.
2. Tingkat produktivitas yang rendah, khususnya tingkat produktivitas tenaga kerja.
3. Tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi.
4. Tingginya tingkat pengangguran, baik pengangguran terselubung (*underemployment*) maupun pengangguran terbuka (*open unemployment*).
5. Ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor produk primer.
6. Dominasi, ketergantungan, dan vulnerabilitas dalam hubungan-hubungan internasional.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Negara Brunai dan Uni Emirat Arab memiliki pendapatan yang sangat tinggi, akan tetapi masih digabungkan dalam kelompok NSB oleh karena ....
  - A. di negara-negara tersebut masih terjadi ketidakseimbangan antara jumlah faktor produksi yang mereka miliki dengan teknologi yang mereka kuasai sehingga keadaan *full-utilization* dari faktor produksi belum tercapai
  - B. jumlah penduduknya terlalu sedikit sehingga pendapatan per kapitanya terlalu tinggi
  - C. struktur ekonomi dan budaya masyarakatnya tidak seimbang
  - D. pernah dijajah oleh Inggris dan sekarang sangat tergantung pada Amerika Serikat
- 2) Di antara hal-hal berikut merupakan ciri-ciri NSB menurut Todaro & Smith (2003), *kecuali* ....
  - A. mengalami konflik perang saudara yang berkepanjangan
  - B. produsen barang-barang primer
  - C. tingkat pengangguran yang tinggi
  - D. mengalami masalah tekanan penduduk

- 3) Ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor produk primer merupakan ciri-ciri negara sedang berkembang menurut ....
- A. Celso Furtado (1964)
  - B. UNDP (2008)
  - C. Bank Dunia (2006)
  - D. Todaro & Smith (2003)
- 4) Negara berpendapatan rendah pada tahun 2004 adalah kelompok negara dengan pendapatan nasional per kapitanya di bawah ....
- A. US \$765
  - B. US \$1000
  - C. US \$1250
  - D. US \$500
- 5) Negara berpendapatan tinggi pada tahun 2004 adalah kelompok negara dengan pendapatan nasional per kapitanya di atas US \$ 9.386.
- A. US \$9.386
  - B. US \$2.000
  - C. US \$5.000
  - D. US \$7.500

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 3

## Ukuran Pembangunan Ekonomi

**A. PEMBANGUNAN EKONOMI ATAU PERTUMBUHAN EKONOMI**

Sebelum dekade 1960-an, pembangunan didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional - di mana keadaan ekonominya mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang cukup lama - untuk dapat mengakselerasi dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP-nya pada angka 5–7% atau lebih per tahun. Definisi pembangunan dalam konteks ini sangat bersifat ekonomis.

Seiring dengan perubahan zaman, definisi pembangunan pun mengalami perubahan karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasikan pada pertumbuhan GNP saja tidak akan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan mendasar dari pembangunan. Hal ini tampak pada taraf dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan meskipun target pertumbuhan GNP per tahun telah tercapai. Dengan kata lain, ada “kesalahan” dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

Oleh karena itu, Todaro & Smith (2003) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Akhirnya, disadari bahwa definisi pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekadar bagaimana meningkatkan GNP per tahun saja. Pembangunan itu bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya salah satu aspek (ekonomi) saja. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan tersebut maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang

menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai sifat sebagai berikut.

1. Suatu **proses** yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu.
2. Usaha untuk **meningkatkan pendapatan per kapita**.
3. Peningkatan pendapatan per kapita itu harus terus **berlangsung dalam jangka panjang**.
4. **Perbaikan sistem kelembagaan** di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi (baik legal formal maupun informal).

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar pola keterkaitan dan saling memengaruhi antara faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi dapat diamati dan dianalisis. Dengan cara tersebut dapat diketahui runtutan peristiwa yang terjadi dan dampaknya pada peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

Selanjutnya, pembangunan ekonomi juga perlu dipandang sebagai suatu proses kenaikan dalam pendapatan per kapita karena kenaikan tersebut mencerminkan tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Biasanya laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tingkat pertambahan GDP atau GNP.

Namun, proses kenaikan pendapatan per kapita secara terus-menerus dalam jangka panjang saja tidak cukup bagi kita untuk mengatakan telah terjadi pembangunan ekonomi. Perbaikan struktur sosial, sistem kelembagaan (baik organisasi maupun aturan main), perubahan sikap dan perilaku masyarakat juga merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi, selain masalah pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2003). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi hanya didefinisikan sebagai kenaikan GDP atau GNP **tanpa** memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah ada perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak.

Namun, ada beberapa ekonom memberikan definisi yang sama untuk kedua istilah tersebut, khususnya dalam konteks negara maju. Secara umum,

istilah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara maju, sedangkan istilah pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi di NSB.

## **B. UKURAN PEMBANGUNAN EKONOMI**

Berdasarkan pengertian tentang pembangunan ekonomi di atas maka untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan indikator yang bersifat fisikal, ekonomi, sosial, dan politik yang dapat dikelompokkan menjadi dua indikator, yaitu indikator moneter, indikator nonmoneter, dan indikator yang bersifat campuran. Masing-masing indikator tersebut dibahas berikut ini.

### **1. Indikator Moneter**

#### *a. Pendapatan per kapita*

Pendapatan per kapita merupakan konsep yang paling sering digunakan sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Konsep pendapatan per kapita itu sendiri merupakan indikator atas kinerja perekonomian secara keseluruhan. Pendapatan per kapita adalah indikator moneter atas setiap aktivitas ekonomi penduduk suatu negara. Namun, banyak ekonom memandang pendapatan per kapita bukanlah indikator yang terbaik atas kinerja pembangunan suatu negara. Hal ini disebabkan oleh adanya argumen yang menyatakan bahwa pembangunan itu bukan hanya sekadar meningkatkan pendapatan riil saja, namun harus pula disertai oleh perubahan-perubahan sikap dan tingkah laku yang sebelumnya menjadi penghambat kemajuan-kemajuan ekonomi.

Meskipun di sisi lain pendapatan per kapita dianggap memiliki kelemahan mendasar sebagai indikator pembangunan, pendekatan ini masih relevan untuk digunakan dan mudah untuk dipahami. Pendekatan ini juga mempunyai sebuah kelebihan, di mana ia memfokuskan diri pada masalah inti (*raison d'etre*) dari pembangunan, yaitu meningkatnya standar hidup dan berkurangnya angka kemiskinan. Dengan kata lain, pendapatan per kapita bukanlah sebuah *proxy* yang buruk dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat.

Pendapatan per kapita juga merupakan salah satu variabel penting dalam pembahasan ekonomi makro. Selain digunakan sebagai indikator tingkat

kemakmuran masyarakat suatu negara, pendapatan per kapita juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara dari masa ke masa, melihat struktur perekonomian suatu negara, serta membandingkan kinerja perekonomian satu negara dengan negara-negara lain.

1) Kelemahan umum pendekatan pendapatan per kapita

Salah satu kelemahan mendasar dari pendapatan per kapita sebagai sebuah indikator pembangunan adalah pada ketidakmampuannya untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara utuh. Sering kali adanya kenaikan pendapatan per kapita suatu negara tidak disertai oleh perbaikan kualitas hidup masyarakatnya.

Sebenarnya, sudah sejak lama ada keraguan pada konsep pendapatan per kapita sebagai cerminan dari tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh segenap masyarakat. Namun, kita harus tetap menyadari bahwa tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka, di samping itu ada beberapa faktor lain yang di nilai cukup penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan mereka.

Faktor-faktor non-ekonomi, seperti adat istiadat, keadaan iklim dan alam sekitar, serta ada atau tidaknya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan bertindak merupakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan di negara-negara yang mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang relatif sama. Misalnya, apabila penduduk di daerah pegunungan kita asumsikan mempunyai tingkat pendapatan yang relatif sama dengan penduduk yang hidup di daerah dataran rendah. Berdasarkan pada perbedaan kondisi alam dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di daerah dataran rendah adalah lebih tinggi karena pada umumnya penduduk di daerah dataran rendah menghadapi tantangan alam yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan penduduk di daerah pegunungan. Di daerah dataran rendah, iklimnya tidak terlalu dingin, pekerjaan bertani dan bercocok tanam pun lebih mudah dilakukan, dan energi yang dikeluarkan untuk perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya relatif lebih sedikit.

Ada tidaknya kebebasan dalam bertindak dan mengeluarkan pendapat juga memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tidak adanya kebebasan dalam bertindak dan mengeluarkan pendapat di suatu negara (misalnya, pada negara-negara sosialis) menyebabkan tingkat

kesejahteraan masyarakatnya selalu dipandang lebih rendah dari yang dicerminkan oleh tingkat pertumbuhan ekonominya.

Di sisi lain, beberapa ekonom memandang bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang **bersifat subjektif**. Artinya, setiap orang mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara hidup yang berbeda sehingga memberikan nilai yang berbeda pula terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Ada sekelompok orang yang lebih menekankan pada pemupukan kekayaan dan tingkat pendapatan yang tinggi sebagai unsur penting untuk mencapai sebuah kepuasan hidup. Ada pula sekelompok orang yang lebih suka untuk memperoleh waktu senggang (*leisure time*) yang lebih banyak dan enggan untuk bekerja lebih keras untuk memperoleh tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Di samping itu, perlu diingat bahwa pembangunan ekonomi mampu merubah kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, misalnya hilangnya rasa komunalitas sehingga masyarakat menjadi bersifat lebih individualistis, hubungan antara anggota masyarakat menjadi lebih formal. Di satu sisi, pembangunan ekonomi dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi ini harus dicapai dengan beberapa pengorbanan dalam perilaku hidup masyarakat.

## 2) Kelemahan metodologis pendekatan pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita sebagai indeks yang menunjukkan perbandingan tingkat kesejahteraan antarmasyarakat ternyata memiliki kelemahan. Kelemahan ini timbul karena pendekatan ini mengabaikan adanya perbedaan karakteristik antar negara, misalnya struktur umur penduduk, distribusi pendapatan masyarakat, kondisi sosial-budaya, dan perbedaan nilai tukar (kurs) satu mata uang terhadap mata uang yang lain.

Dibandingkan dengan negara-negara maju, proporsi penduduk usia nonproduktif (di bawah umur) terhadap keseluruhan penduduk di NSB cukup tinggi. Dengan demikian, perbandingan pendapatan setiap keluarga di kedua kelompok negara itu tidaklah seburuk seperti yang digambarkan oleh pendapatan per kapita mereka. Misalnya, keluarga Pak Amir terdiri dari 5 anggota keluarga dengan pendapatan US \$900 dan keluarga Pak Badu terdiri dari 3 anggota keluarga dengan pendapatan US \$600. Meskipun pendapatan per kapita anggota keluarga Pak Amir lebih rendah dibandingkan pendapatan per kapita anggota keluarga Pak

Badu, sangat mungkin keluarga Pak Amir mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan keluarga Pak Badu karena beberapa jenis pengeluaran mendasar, seperti rekening air dan listrik, perumahan, serta barang-barang lain yang digunakan secara bersama-sama tidak banyak berbeda di antara kedua keluarga tersebut.

Selain tingkat pendapatan, **distribusi pendapatan** merupakan faktor yang cukup penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktor ini sering kali kurang diperhatikan dalam perhitungan tingkat pendapatan per kapita karena asumsi pokok yang digunakan dalam konsep pendapatan per kapita adalah *one dollar, one man*, artinya setiap orang memiliki proporsi yang sama atas pembentukan pendapatan per kapita. Perkembangan di banyak NSB menunjukkan bahwa seiring dengan proses pembangunannya, distribusi pendapatan justru menjadi semakin timpang.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan terhadap usaha-usaha pembangunan di beberapa NSB karena usaha-usaha pembangunan dianggap hanya menguntungkan sebagian kecil anggota masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan paling mendasar dari pembangunan belum sepenuhnya tercapai.

Paling tidak, ada tiga hal yang menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat meskipun tingkat pendapatan per kapitanya secara nominal relatif sama: **(a) Pola pengeluaran masyarakat**, adanya perbedaan pada pola pengeluaran masyarakat menyebabkan dua negara dengan pendapatan per kapita yang sama belum tentu menikmati tingkat kesejahteraan yang sama. Misalnya, kita asumsikan ada dua orang dengan tingkat pendapatan relatif sama, namun salah seorang di antaranya harus mengeluarkan ongkos angkutan yang lebih tinggi untuk pergi ke tempat kerja, harus berpakaian necis maka tidak dapat dikatakan bahwa kedua orang tersebut mempunyai tingkat kesejahteraan yang sama tingginya.

**(b) Perbedaan iklim**, adanya perbedaan iklim juga memungkinkan timbulnya perbedaan pola pengeluaran masyarakat di negara-negara maju dan NSB. Masyarakat di negara maju harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mencapai suatu tingkat kesejahteraan yang sama dengan di NSB. Seperti kita ketahui, sebagian besar negara maju beriklim dingin dan sebagian besar NSB beriklim tropis. Oleh karena itu, penduduk negara-negara maju sering kali harus mengeluarkan uang

dalam jumlah yang besar untuk dapat menikmati “iklim tropis” seperti yang biasa dinikmati oleh penduduk NSB. (c) **Struktur produksi nasional**, adanya perbedaan yang mencolok pada komposisi sektoral juga akan memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Suatu masyarakat akan menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih rendah jika proporsi pendapatan nasional (pengeluaran) yang digunakan untuk anggaran pertahanan dan pembentukan modal (*capital formation*) lebih tinggi dibandingkan di negara lain yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang relatif sama.

Selama ini, metode perhitungan pendapatan nasional bersifat agregatif sehingga tidak dapat menunjukkan perubahan serta distribusi antar sektor. Misalnya, jika sektor pertanian memiliki proporsi sebesar 50% dari GNP dan sektor non-pertanian juga 50% dari GNP maka jika GNP tumbuh sebesar 10% per tahunnya, kemungkinan distribusinya ditunjukkan oleh Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2.  
Kemungkinan Distribusi Sektoral dari Pertumbuhan GNP 10%

| Sektor                           | Persentase Kenaikan Sektoral |   |   |    |
|----------------------------------|------------------------------|---|---|----|
|                                  | A                            | B | C | D  |
| Pertumbuhan sektor pertanian     | 5                            | 4 | 2 | 0  |
| Pertumbuhan sektor non-pertanian | 5                            | 6 | 8 | 10 |

Kombinasi D menunjukkan adanya stagnasi di sektor pertanian. Hal ini dipicu oleh adanya transformasi struktural, dari sektor pertanian menuju ke sektor modern (non-pertanian). Di sisi lain, fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian di NSB telah mengalami kegagalan, mengingat sebagian besar penduduk NSB menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan semakin memburuknya tingkat kesejahteraan penduduk di sektor tersebut.

Adanya perbedaan nilai tukar juga mengakibatkan perbandingan tingkat pendapatan per kapita antara negara-negara maju dan NSB selalu timpang sehingga perbedaan tingkat kesejahteraan yang digambarkan

jauh lebih besar daripada yang sebenarnya terjadi di antara kedua kelompok negara tersebut.

Dalam studinya, Usher (1963) dalam Arsyad (1999) mengestimasi bahwa perbandingan pendapatan per kapita antara Inggris dan Thailand adalah 1:13,06. Artinya, jumlah pendapatan per kapita Inggris adalah 13,06 kali lebih besar daripada pendapatan per kapita Thailand. Angka perbandingan tersebut didapatkan jika pendapatan nasional Thailand dalam mata uangnya sendiri (*baht*) dikonversikan terhadap poundsterling pada tingkat kurs yang berlaku. Namun, apabila pendapatan per kapita Inggris dan Thailand dinilai secara langsung pada tingkat harga di Thailand maka perbandingan tersebut hanya **1:6,27**, dan jika pendapatan per kapita antara kedua negara tersebut dinilai pada tingkat harga di Inggris maka perbandingan tersebut akan turun menjadi **1:2,76**.

Di sisi lain, pada permulaan tahun 1950-an, Millikan (1950) dalam Arsyad (1999) juga mengestimasi tingkat pendapatan per kapita negara-negara di kawasan Asia (kecuali Timur Tengah). Menurut perhitungan konvensional, pendapatan per kapita negara-negara di kawasan tersebut adalah US \$58, namun menurut hasil estimasi Millikan, pendapatan per kapita dari negara-negara di kawasan tersebut mencapai US \$195. Di sisi lain, untuk negara-negara di kawasan Afrika menurut perhitungan konvensional, nilai pendapatan per kapita mereka adalah US \$48. Setelah dilakukan estimasi ulang ternyata nilai sebenarnya adalah US \$117. Sebagai bahan pembanding, dari studi yang dilakukan oleh Gilbert dan Kravis diperoleh temuan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di beberapa negara maju ternyata lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pendapatan per kapita mereka.

Kesalahan dalam mengestimasi tingkat pendapatan per kapita di NSB disebabkan oleh adanya “ketidaksempurnaan” dalam metode penghitungan pendapatan per kapita. Ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu sebagai berikut.

- a) Adanya masalah dalam menentukan jenis-jenis kegiatan yang harus dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional karena selama ini jenis-jenis kegiatan yang dimasukkan ke dalam perhitungan pendapatan nasional adalah setiap kegiatan yang *marketable*, artinya hasil akhir dari kegiatan tersebut dapat dipasarkan, hal ini berarti pemilik faktor produksi memperoleh balas jasa atas kegiatannya tersebut. Padahal di NSB banyak sekali kegiatan-kegiatan produktif

yang tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional, misalnya mengerjakan sendiri pekerjaan-pekerjaan rumah.

- b) Adanya kesulitan dalam mengkonversi nilai pendapatan per kapita dari mata uang suatu negara ke mata uang negara lainnya karena selama ini nilai tukar resmi mata uang suatu negara dengan negara lain tidak mencerminkan perbandingan tingkat harga di kedua negara tersebut. Misalnya, kita asumsikan nilai tukar resmi antara mata uang negara kita (rupiah) terhadap dolar Amerika Serikat adalah  $US \$1 = Rp9.350,00$ . Secara teoretis, hal ini berarti harga sebuah barang yang ada di Amerika Serikat apabila dikalikan dengan Rp9.350,00 maka harus sama nilainya dengan barang yang sama di Indonesia. Namun kenyataannya, nilai barang tersebut di Indonesia bisa lebih kecil atau malah lebih besar dari nilai yang seharusnya.

#### b. Kesejahteraan ekonomi bersih

Sebuah pendekatan baru tentang indikator kesejahteraan dikemukakan oleh William Nordhaus & James Tobin (1972) dalam Arsyad (1999). Mereka mencoba menyempurnakan metode perhitungan GNP dalam upaya untuk memperoleh suatu indikator ekonomi yang lebih baik. Mereka mengenalkan konsep *Net Economic Welfare* (NEW). Penyempurnaan dalam metode perhitungan GNP dilakukan dengan dua cara, yaitu *koreksi positif* dan *koreksi negatif*.

##### 1) Koreksi positif

Koreksi positif mengharuskan kita untuk memperhatikan waktu senggang (*leisure*) dan perkembangan sektor ekonomi informal. Waktu senggang ini berkaitan dengan jumlah jam kerja kita selama seminggu dan waktu yang kita luangkan untuk aktivitas-aktivitas nonekonomi. Seandainya kita menjadi lebih kaya, mungkin kita akan memutuskan untuk bekerja lebih singkat dalam seminggu, dengan harapan akan memperoleh tambahan “kepuasan” karena adanya tambahan waktu senggang untuk “menikmati hidup”. Kepuasan yang didapatkan dari adanya waktu senggang ini diharapkan sama besarnya dengan kepuasan yang diperoleh dari balas jasa atas aktivitas produksi yang dilakukan. Di satu sisi, adanya tambahan waktu senggang menyebabkan berkurangnya kapasitas produksi nasional yang pada akhirnya akan menurunkan nilai

GNP. Namun di sisi lain, adanya tambahan waktu senggang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Dengan demikian, agar “kepuasan” dari adanya waktu senggang tetap diperhitungkan maka sebuah koreksi harus ditambahkan pada perhitungan GNP sehingga menghasilkan konsep NEW.

Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dikerjakan sendiri di rumah, seperti memasak, membersihkan kamar atau mengecat dinding rumah. Oleh karena nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tersebut tidak dibeli atau dijual di pasar maka nilai tambah tersebut tidak pernah dimasukkan dalam perhitungan GNP. Namun, nilai NEW mencakup juga nilai dari kegiatan “kerja sendiri” tersebut.

Koreksi positif lainnya adalah berkaitan dengan sektor ekonomi informal. Seperti kita ketahui, pada beberapa tahun terakhir pertumbuhan sektor ekonomi informal sangatlah pesat. Sektor ekonomi informal ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu (a) kegiatan ekonomi yang ilegal atau melawan hukum, misalnya perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang; dan (b) kegiatan ekonomi yang legal tetapi tidak tercatat sehingga terhindar dari pajak, misalnya pendapatan dari tukang batu yang memperbaiki rumah kita.

Pada umumnya, para ekonom tidak menambahkan nilai kegiatan ilegal ke dalam nilai produk nasional karena sudah ada kesepakatan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang buruk dari segi sosial. Oleh karena itu, bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang tidak dimasukkan ke dalam nilai GNP maupun NEW.

Sekarang bagaimana dengan kegiatan informal lainnya seperti yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, tukang bakso, tukang becak, tukang tambal ban? Mereka semua menghasilkan “output” yang sangat berguna dan bernilai jual, namun tidak dimasukkan dalam perhitungan produksi nasional. Sebagai konsekuensinya, laju pertumbuhan GNP riil akan lebih rendah dari sebenarnya.

## 2) Koreksi negatif

Di sisi lain, koreksi negatif berkaitan dengan masalah eksternalitas yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan di sektor produktif. Koreksi negatif mempertimbangkan tentang biaya-biaya sosial (*social costs*) yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas ekonomi. Misalnya, adanya proyek pembangunan perumahan, selain membawa output positif berupa adanya perumahan yang nyaman, namun juga membawa output negatif berupa

polusi dan kerusakan sistem tanah. Output negatif tersebut menggambarkan biaya-biaya sosial yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan perumahan. Sering kali GNP dinilai terlalu tinggi dari nilai yang sebenarnya sehingga biaya-biaya sosial harus dimasukkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan GNP untuk mendapatkan nilai NEW. Oleh karena itu, menurut Nordhaus & Tobin (1972) nilai NEW per kapita tumbuh lebih lambat dari GNP per kapita. Hal ini jelas dapat kita rasakan dengan semakin bergantungnya kita pada industri berat yang polusif, pada bahan-bahan kimia organik kurang ramah lingkungan, serta semakin sesaknya suasana di kota-kota besar.

Akhirnya, dengan melandaskan diri pada indikator yang lebih terpadu, seperti NEW ini maka pemerintah diharapkan akan lebih terarah dalam menentukan prioritas pembangunan nasional. Pertumbuhan suatu bangsa sebaiknya tidak semata-mata hanya dikaitkan dengan peningkatan secara lahir (fisik) saja. Perekonomian seyogianya mengarah pada tujuan yang lebih luas, seperti keseimbangan antara waktu kerja dan waktu senggang, atau pemanfaatan sumber daya secara lebih baik agar dampak buruk dari pencemaran lingkungan dapat diminimalisasi.

## 2. Indikator Non-moneter

### a. Indikator sosial

Beckerman dalam *International Comparisons of Real Incomes* (1966) mengelompokkan berbagai studi mengenai metode untuk membandingkan tingkat kesejahteraan suatu negara ke dalam tiga kelompok, yaitu (1) kelompok yang membandingkan tingkat kesejahteraan di beberapa negara dengan memperbaiki metode yang digunakan dalam perhitungan pendapatan konvensional. Usaha ini dipelopori oleh Colin Clark, selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Kravis; (2) kelompok yang membuat penyesuaian dalam perhitungan pendapatan nasional dengan mempertimbangkan adanya perbedaan tingkat harga di setiap negara; dan (3) kelompok yang membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter (*non-monetary indicators*), seperti jumlah kendaraan bermotor, tingkat elektrifikasi, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang bersekolah, usaha ini dipelopori oleh Bennet.

Menurut Beckerman (1966), dari berbagai metode di atas, metode yang digunakan oleh Gilbert dan Kravis adalah metode yang paling sempurna. Pada metode ini, dilakukan perbaikan pada metode perhitungan pendapatan konvensional dengan menggunakan data pendapatan nasional dari masing-masing negara. Dengan studinya, mereka membandingkan tingkat pendapatan per kapita antara negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Mereka melakukan perhitungan kembali pada pendapatan nasional negara-negara di kawasan Eropa berdasarkan atas tingkat harga di Amerika Serikat. Dengan kata lain, nilai produksi negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat di nilai dengan tingkat harga yang sama. Kesimpulan dari studi yang dilakukan Gilbert dan Kravis adalah bahwa perbedaan tingkat pendapatan per kapita antara penduduk negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat tidaklah sebesar seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan tingkat pendapatan per kapita mereka yang dihitung menurut metode konvensional.

Namun, metode ini memerlukan data yang lengkap dan sering kali data yang diperlukan dalam estimasi tidak tersedia di NSB. Oleh karena itu, Beckerman (1966) mengemukakan metode lain dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, yaitu dengan menggunakan data yang bukan bersifat moneter. Metode ini dinamakan *Indikator Non-moneter yang Disederhanakan (Modified non-monetary indicators)*.

Pada metode ini, tingkat kesejahteraan dari setiap negara ditentukan oleh beberapa indikator, antara lain:

- 1) jumlah konsumsi baja dalam satu tahun (kg);
- 2) jumlah konsumsi semen dalam satu tahun dikalikan 10 (ton);
- 3) jumlah surat dalam negeri dalam satu tahun;
- 4) jumlah persediaan pesawat radio dikalikan 10;
- 5) jumlah persediaan telepon dikalikan 10;
- 6) jumlah persediaan berbagai jenis kendaraan;
- 7) jumlah konsumsi daging dalam satu tahun (kg).

Pada tahun 1970, *United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD)*, sebuah badan PBB yang berpusat di Jenewa melalui studinya mencoba membandingkan tingkat kesejahteraan negara-negara di dunia. Dalam studinya, UNSRID mengacu pada 18 indikator, yang

terdiri dari 10 indikator ekonomi dan 8 indikator sosial. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Tingkat harapan hidup.
- 2) Konsumsi protein hewani per kapita.
- 3) Persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah.
- 4) Persentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan.
- 5) Jumlah surat kabar.
- 6) Jumlah telepon.
- 7) Jumlah radio.
- 8) Jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih.
- 9) Persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian.
- 10) Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas, air, kesehatan, pengangkutan, perdagangan, dan komunikasi.
- 11) Persentase tenaga kerja yang memperoleh gaji atau upah.
- 12) Persentase Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari industri-industri manufaktur.
- 13) Konsumsi energi per kapita.
- 14) Konsumsi listrik per kapita.
- 15) Konsumsi baja per kapita.
- 16) Nilai per kapita perdagangan luar negeri.
- 17) Produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sektor pertanian.
- 18) Pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto (PNB).

Jika indeks pembangunan yang diusulkan UNRISD tersebut digunakan sebagai indikator kesejahteraan maka dapat dipastikan perbedaan tingkat pembangunan antara negara-negara maju dan NSB tidaklah terlalu besar seperti yang digambarkan oleh tingkat pendapatan per kapita mereka. Hasil studi UNSRID menyebutkan bahwa dari 58 negara yang dihitung indeks pembangunannya, Thailand merupakan negara dengan indeks paling rendah (10). Untuk pembangunan Inggris adalah 104 sehingga secara relatif dapat dikatakan bahwa indeks pembangunan Inggris 10 kali lebih besar dari Thailand. Nilai tersebut jelas lebih kecil dari perbandingan pendapatan per kapita kedua negara tersebut. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, hasil studi Usher (1963) menyebutkan bahwa perbandingan pendapatan per kapita antara Inggris dan Thailand dengan cara konvensional menghasilkan angka

**13,06.** Artinya, pendapatan Inggris adalah 13,06 kali pendapatan per kapita Thailand.

Di antara negara-negara maju, perbedaan tingkat kesejahteraan yang digambarkan oleh indeks pembangunan sering kali lebih kecil dibandingkan jika menggunakan tolok ukur pendapatan per kapita mereka. Misalnya, pada tahun 1970, perbandingan pendapatan per kapita Belanda dan Swedia adalah US \$965 dan US \$1,696, sebuah angka yang cukup timpang bukan? Untuk perbandingan indeks pembangunan mereka menunjukkan bahwa tingkat pembangunan yang dicapai kedua negara tersebut tidak banyak berbeda yaitu **96 : 103**. Kesimpulan yang diperoleh dari studi UNSRID adalah bahwa di banyak negara, pembangunan sosial berlangsung lebih cepat dibandingkan pembangunan ekonominya.

*b. Indeks kualitas hidup*

Pada Tahun 1979, Morris D. Morris memperkenalkan satu indikator alternatif dalam mengukur kinerja pembangunan suatu Negara, yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH) atau *Physical Quality of Life Index*. Ada tiga indikator utama yang dijadikan acuan pada indeks ini, yaitu tingkat harapan hidup pada usia satu tahun, tingkat kematian bayi dan tingkat melek huruf.

Berdasarkan setiap indikator tersebut dilakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan suatu negara, kinerja tersebut diberi skor antara **1** sampai **100**, angka **1** melambangkan kinerja terburuk dan angka **100** melambangkan kinerja terbaik. Untuk indikator harapan hidup, batas atas (*upper limit*) 100 ditetapkan 77 tahun (harapan hidup tertinggi pada saat studi ini berlangsung, dicapai oleh Swedia). Batas bawah (*lower limit*) adalah 28 tahun (tingkat harapan hidup terendah di Guinea-Bissau pada tahun 1950). Antara batas atas dan batas bawah itulah, tingkat harapan hidup suatu negara diperingkatkan dengan skor antara 1 sampai 100. Demikian pula untuk tingkat kematian bayi, batas atasnya 9 kematian per 1.000 kelahiran (juga dicapai Swedia pada tahun 1973), sedangkan batas bawahnya adalah 229 kematian per 1.000 kelahiran (tingkat kematian bayi tertinggi, di Gabon).

Kesimpulan umum yang diperoleh dari studi Morris D. Morris adalah bahwa negara-negara dengan pendapatan per kapita yang rendah cenderung memiliki IKH yang rendah pula. Namun, hubungan antara pendapatan per kapita dan IKH tidak selamanya searah. Sejumlah negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi justru malah memiliki IKH yang rendah, bahkan lebih rendah dari IKH negara-negara miskin. Di sisi lain, sejumlah negara dengan

jumlah pendapatan per kapita yang rendah justru memiliki IKH yang lebih tinggi dari negara-negara berpenghasilan menengah ke atas. Tabel 1.3 berikut menunjukkan tren IKH di tingkat provinsi di Indonesia pada tiga dekade terakhir.

Tabel 1.3.  
Tren Indeks Kualitas Hidup (PQLI) di Indonesia

| Negara             | 1970 | 1980 | 1990 |
|--------------------|------|------|------|
| Provinsi:          |      |      |      |
| Aceh               | 50   | 64   | 78   |
| Sumatra Utara      | 58   | 68   | 79   |
| Sumatera Barat     | 50   | 57   | 75   |
| Riau               | 54   | 59   | 77   |
| Jambi              | 44   | 56   | 74   |
| Sumatra Selatan    | 47   | 64   | 75   |
| Bengkulu           | 46   | 59   | 75   |
| Lampung            | 48   | 63   | 75   |
| DKI Jakarta        | 54   | 72   | 86   |
| Jawa Barat         | 43   | 53   | 68   |
| Jawa Tengah        | 42   | 59   | 73   |
| D.I. Yogyakarta    | 41   | 69   | 80   |
| Jawa Timur         | 44   | 57   | 72   |
| Bali               | 42   | 59   | 76   |
| NTB                | 30   | 31   | 47   |
| NTT                | 45   | 51   | 58   |
| Timor-Timur        | -    | -    | 55   |
| Kalimantan Barat   | 42   | 51   | 67   |
| Kalimantan Tengah  | 53   | 63   | 79   |
| Kalimantan Selatan | 48   | 57   | 69   |
| Kalimantan Timur   | 52   | 62   | 79   |
| Sulawesi Utara     | 62   | 69   | 80   |
| Sulawesi Tengah    | 49   | 69   | 56   |
| Sulawesi Selatan   | 38   | 54   | 71   |
| Sulawesi Timur     | 36   | 54   | 70   |
| Maluku             | 51   | 51   | 74   |
| Irian Jaya         | -    | 57   | 64   |

Sumber: BPS (1992).

### 3. Indikator Campuran

#### a. Indikator Susenas Inti

Pada tahun 1992, Biro Pusat Statistik (BPS) mengembangkan suatu indikator kesejahteraan rakyat yang disebut *Indikator Susenas Inti (Core*

*Susenas*). Indikator *Susenas* Inti ini merupakan indikator “campuran” karena terdiri indikator sosial dan ekonomi. Indikator *Susenas* Inti ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

- 1) **Pendidikan**, dengan indikator: tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat partisipasi pendidikan.
- 2) **Kesehatan**, dengan indikator: rata-rata hari sakit dan fasilitas kesehatan yang tersedia.
- 3) **Perumahan**, dengan indikator: sumber air bersih dan listrik, sanitasi, dan kualitas tempat tinggal.
- 4) **Angkatan Kerja**, dengan indikator: partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, dan status pekerjaan.
- 5) **Keluarga Berencana dan Fertilitas**, dengan indikator: penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga kesehatan pada kelahiran, dan penggunaan alat kontrasepsi.
- 6) **Ekonomi**, dengan indikator: tingkat konsumsi per kapita.
- 7) **Kriminalitas**, dengan indikator: angka kriminalitas per tahun.
- 8) **Perjalanan wisata**, dengan indikator: frekuensi perjalanan wisata per tahun.
- 9) **Akses ke media massa**, dengan indikator: jumlah surat kabar, jumlah radio, dan jumlah televisi.

*b. Indeks pembangunan manusia*

Sejak tahun 1990, *United Nations for Development Program* (UNDP) mengembangkan sebuah indeks kinerja pembangunan yang kini dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Sama seperti IKH, IPM juga mencoba melakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan, namun lebih menyentuh aspek “manusia”-nya. Berdasarkan nilai indeks IPM-nya, setiap negara dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah (*low human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0 sampai 0,50.
- 2) Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah (*medium human development*), apabila memiliki nilai IPM antara 0,50 sampai 0,79.
- 3) Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0,79 sampai 1.

Nilai IPM didasarkan atas rata-rata kinerja ketiga indikator acuannya, yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan riil per kapita berdasarkan paritas daya beli.

Tabel 1.4.  
Indeks Pembangunan Manusia Untuk 15 Negara, 2004

| Negara                                | Tingkat Harapan Hidup (Tahun) | Tingkat Melek Huruf (Dewasa) | GDP Per Kapita (PPP, US \$) | Nilai IPM    |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>High Human Development</b>         |                               |                              |                             |              |
| Norwegia                              | 79.6                          | 99.9                         | 38.454 (4)                  | 0.965 (1)    |
| Jepang                                | 82.2                          | 99.9                         | 29.251 (18)                 | 0.949 (7)    |
| Amerika Serikat                       | 77.5                          | 99.9                         | 39.676 (2)                  | 0.948 (8)    |
| Inggris                               | 78.5                          | 99.9                         | 30.821 (13)                 | 0.940 (18)   |
| Israel                                | 80.0                          | 97.1                         | 24.382 (23)                 | 0.927 (23)   |
| Singapura                             | 78.9                          | 92.5                         | 28.077 (21)                 | 0.916 (25)   |
| <b>Medium Human Development</b>       |                               |                              |                             |              |
| Brasil                                | 70.8                          | 88.6                         | 8.195 (64)                  | 0.792 (69)   |
| Thailand                              | 70.3                          | 92.6                         | 8.090 (65)                  | 0.784 (74)   |
| Arab Saudi                            | 72.0                          | 79.4                         | 13.825 (40)                 | 0.777 (76)   |
| Indonesia                             | 67.2                          | 90.4                         | 3.609 (116)                 | 0.711 (108)  |
| India                                 | 63.6                          | 61.0                         | 3.139 (117)                 | 0.611 (126)  |
| Timor-Leste                           | 56.0                          | 58.6                         | 1.033 (162)                 | 0.512 (142)  |
| <b>Low Human Development</b>          |                               |                              |                             |              |
| Kenya                                 | 47.5                          | 73.6                         | 1.140 (159)                 | 0.491 (152)  |
| Nigeria                               | 43.4                          | 67.0                         | 1.154 (158)                 | 0.448 (159)  |
| Etiopia                               | 47.8                          | 42.0                         | 756 (171)                   | 0.371 (170)  |
| <b>Negara Berpenghasilan Tinggi</b>   | <b>78.8</b>                   | <b>n.a.</b>                  | <b>31.331</b>               | <b>0.942</b> |
| <b>Negara Berpenghasilan Menengah</b> | <b>70.3</b>                   | <b>89.9</b>                  | <b>6.756</b>                | <b>0.768</b> |
| <b>Negara Berpenghasilan Rendah</b>   | <b>58.7</b>                   | <b>62.3</b>                  | <b>2.297</b>                | <b>0.556</b> |

Sumber: UNDP, Human Development Report, (2006).

Keterangan: Angka ( ) menunjukkan peringkat di dunia.

Tabel 1.4 menunjukkan tingkat harapan hidup, persentase melek huruf, pendapatan per kapita dan nilai IPM, serta perbandingan peringkat negara-negara atas dasar pendapatan per kapita dan nilai IPM untuk 15 negara. Negara yang memiliki nilai IPM tertinggi pada tahun 2004 adalah Norwegia (0,965). Indonesia berada pada peringkat 108 dengan nilai IPM sebesar 0,711. Di sisi lain, kelompok negara-negara yang memiliki tingkat pembangunan manusia yang rendah (*low human development*) hampir semuanya berasal dari kawasan Afrika. Satu hal yang cukup menarik di sini adalah bahwa negara-negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi cenderung memiliki nilai IPM yang tinggi pula. Namun, fenomena tersebut tidak terjadi pada semua negara. Misalnya, Arab Saudi, suatu negara yang memiliki pendapatan per kapita 1,5 kali lebih besar daripada Brasil, namun ternyata nilai IPM Brasil (0,792) relatif lebih tinggi daripada Arab Saudi (0,777).

Tabel 1.5 menyajikan IPM di 30 provinsi di Indonesia. Berdasarkan IPMnya, provinsi DKI Jakarta berada pada urutan pertama dengan nilai IPM sebesar 76,1. Sementara, provinsi Nusa Tenggara Barat berada urutan terakhir dengan nilai IPM sebesar 65,8. provinsi dengan tingkat pengeluaran per kapita yang tinggi tidak menjamin bahwa provinsi tersebut juga memiliki angka IPM yang tinggi, misalnya, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan kriteria dari UNDP, keseluruhan provinsi di Indonesia termasuk dalam provinsi-provinsi dengan tingkat pembangunan manusia menengah (*medium human development*) dengan kisaran antara 65,8 sampai 76,1.

“Pelajaran” yang dapat ditarik dari kedua tabel di atas adalah bahwa nilai IPM suatu negara atau daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan internal pemerintah negara atau daerah tersebut terkait mengenai aspek pembangunan manusia-nya, bukan hanya pada besar kecilnya pendapatan per kapita yang dimiliki. Kebijakan-kebijakan dalam negeri pemerintah yang mendukung aspek pembangunan manusia dapat pula ditunjukkan oleh proporsi anggaran pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi proporsi anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kedua sektor tersebut, menunjukkan semakin tinggi pula perhatian pemerintah terkait mengenai aspek pembangunan manusianya.

Tabel 1.5.  
Peringkat IPM Berdasarkan Provinsi di Indonesia, 2002

| No. | Provinsi            | Usia Harapan Hidup (tahun) | Tingkat Melek Huruf, dewasa (%) | Rata-rata lama pendidikan (tahun) | Pengeluaran per kapita (Rp. 000) | Nilai IPM   |
|-----|---------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1   | DKI Jakarta         | 72.3                       | 98.2                            | 10.4                              | 616.9                            | 76.6        |
| 2   | Sulawesi Utara      | 70.9                       | 98.8                            | 8.6                               | 587.9                            | 71.3        |
| 3   | D.I. Yogyakarta     | 72.4                       | 85.9                            | 8.1                               | 611.3                            | 70.8        |
| 4   | Kalimantan Timur    | 69.4                       | 95.2                            | 8.5                               | 591.6                            | 70.0        |
| 5   | Riau                | 68.1                       | 96.5                            | 8.3                               | 588.3                            | 69.1        |
| 6   | Kalimantan Tengah   | 69.4                       | 96.4                            | 7.8                               | 595.9                            | 69.1        |
| 7   | Sumatra Utara       | 67.3                       | 96.1                            | 8.4                               | 589.2                            | 68.8        |
| 8   | Sumatra Barat       | 66.1                       | 95.1                            | 8.0                               | 589.0                            | 67.5        |
| 9   | Bali                | 70.0                       | 84.2                            | 7.6                               | 596.3                            | 67.5        |
| 10  | Jambi               | 66.9                       | 94.7                            | 7.4                               | 585.6                            | 67.1        |
| 11  | Banten              | 62.4                       | 93.8                            | 7.9                               | 608.7                            | 66.6        |
| 12  | Maluku              | 65.5                       | 96.3                            | 8.0                               | 576.3                            | 66.5        |
| 13  | Jawa Tengah         | 68.9                       | 85.7                            | 6.5                               | 594.2                            | 66.3        |
| 14  | Bengkulu            | 66.4                       | 93.0                            | 7.6                               | 566.6                            | 66.2        |
| 15  | Nangroe Aceh D.     | 67.7                       | 95.8                            | 7.8                               | 557.5                            | 66.0        |
| 16  | Sumatra Selatan     | 65.7                       | 94.1                            | 7.1                               | 582.9                            | 66.0        |
| 17  | Jawa Barat          | 54.5                       | 93.1                            | 7.2                               | 592.0                            | 65.8        |
| 18  | Lampung             | 66.1                       | 93.0                            | 6.9                               | 583.3                            | 65.8        |
| 19  | Maluku Utara        | 63.0                       | 95.8                            | 8.4                               | 583.4                            | 65.8        |
| 20  | Bangka Belitung     | 65.6                       | 91.7                            | 6.6                               | 588.2                            | 65.4        |
| 21  | Sulawesi Selatan    | 68.6                       | 83.5                            | 6.8                               | 586.7                            | 65.3        |
| 22  | Sulawesi Tengah     | 63.3                       | 93.3                            | 7.3                               | 580.2                            | 64.4        |
| 23  | Kalimantan Selatan  | 61.3                       | 93.3                            | 7.0                               | 596.2                            | 64.3        |
| 24  | Gorontalo           | 64.2                       | 95.2                            | 6.5                               | 573.3                            | 64.1        |
| 25  | Jawa Timur          | 66.0                       | 83.2                            | 6.5                               | 593.8                            | 64.1        |
| 26  | Sulawesi Tenggara   | 65.1                       | 88.2                            | 7.3                               | 577.9                            | 64.1        |
| 27  | Kalimantan Barat    | 64.4                       | 86.9                            | 6.3                               | 580.4                            | 62.9        |
| 28  | Nusa Tenggara Timur | 63.8                       | 94.1                            | 6.0                               | 563.1                            | 60.3        |
| 29  | Papua               | 65.2                       | 74.4                            | 6.0                               | 578.2                            | 60.1        |
| 30  | Nusa Tenggara Barat | 59.3                       | 77.8                            | 5.8                               | 583.1                            | 67.8        |
|     | <b>Indonesia</b>    | <b>66.2</b>                | <b>89.5</b>                     | <b>7.1</b>                        | <b>591.2</b>                     | <b>65.8</b> |

Sumber: BPS, *et al.*, National Human Development Report, (2004).

Konsep IPM memberikan pemahaman pada kita mengenai apa yang seharusnya dipandang sebagai “hasil pembangunan”. Pembangunan berawal

dan bertitik tolak dari “manusia” maka sudah semestinya berakhir pada “manusia”. Di dalam konsep IPM terdapat perpaduan antara aspek-aspek sosial dan ekonomi, hal tersebut memungkinkan konsep ini untuk dapat memberikan gambaran yang lebih luas bagi kinerja pembangunan suatu negara. Di sisi lain, adanya keterbatasan anggaran pembangunan merupakan “masalah klasik” yang dihadapi oleh setiap negara. Sehubungan dengan konsep *development via shortage* yang diajukan oleh Hirschman (1958), adanya konsep IPM juga memungkinkan suatu negara untuk dapat memfokuskan kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial mereka ke sektor yang paling membutuhkan.

Namun, sama halnya dengan konsep pendapatan per kapita, konsep IPM pun tidak lepas dari kelemahan dan kritik. Sejumlah ekonom memandang asumsi-asumsi dan taksiran-taksiran dari IPM sering kali tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka juga berpendapat bahwa metodologi perhitungan yang digunakan dalam perhitungan IPM terlalu “longgar”. Selain itu, sering kali data yang kurang layak dan tidak akurat dimasukkan dalam perhitungan sehingga perbandingan antar negara yang ditunjukkan oleh angka-angka IPM menjadi kurang relevan.

Meskipun ada beberapa kelemahan dan kritik atas konsep IPM, namun konsep ini masih layak digunakan. Selain itu, ketiga indikator utama IPM yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan GNP per kapita rasanya terlalu penting untuk diabaikan. Semua indikator tersebut bisa dijadikan acuan untuk memperdalam pemahaman kita mengenai proses pembangunan yang sedang berjalan.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan 3 nilai pokok pembangunan!
- 2) Jelaskan pengertian pembangunan ekonomi dan perbedaannya dengan pertumbuhan ekonomi!
- 3) Jelaskan ukuran keberhasilan pembangunan!

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Tiga nilai pokok pembangunan (a) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*); (b) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia; dan (c) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*).
- 2) Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang mencakup terjadinya pertumbuhan ekonomi, pengurangan kepincangan distribusi pendapatan, penurunan kemiskinan, yang disertai perubahan struktur sosial, perbaikan sistem kelembagaan (baik organisasi maupun aturan main), dan perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Pertumbuhan ekonomi hanya dicerminkan oleh terjadinya kenaikan pendapatan per kapita saja, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain.
- 3) Keberhasilan pembangunan dapat diukur dengan menggunakan 3 kelompok indikator, yaitu indikator moneter (misalnya pendapatan per kapita dan kesejahteraan ekonomi bersih), indikator nonmoneter (misalnya indeks kualitas hidup), serta indikator campuran (misalnya indeks pembangunan manusia).

**RANGKUMAN**

---

Todaro & Smith (2003) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kebebasan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Pendapatan per kapita yang merupakan indikator moneter atas setiap kegiatan ekonomi penduduk suatu negara merupakan indikator keberhasilan pembangunan yang paling sering digunakan. Namun, banyak ekonom memandang pendapatan per kapita bukanlah indikator yang terbaik karena pembangunan bukan hanya meningkatkan pendapatan riil saja, harus pula disertai oleh perubahan-perubahan sikap dan perilaku suatu masyarakat.

Sejak tahun 1990, indikator pembangunan yang paling banyak sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (*Human*

*Development Index*). Nilai IPM ini dihitung berdasarkan atas rata-rata kinerja tiga indikator acuannya yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan riil per kapita berdasarkan paritas daya beli.



### TES FORMATIF 3

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pertumbuhan biasanya digunakan untuk mengatakan perkembangan ekonomi di negara ....
  - A. sedang berkembang
  - B. terbelakang
  - C. industri
  - D. maju
  
- 2) Konsep yang paling sering digunakan sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara adalah ....
  - A. pendapatan nasional
  - B. produk domestik bruto
  - C. produk domestik regional bruto
  - D. pendapatan per kapita
  
- 3) Di antara indikator pembangunan, pendapatan per kapita masih merupakan yang terbaik. Alasannya adalah ....
  - a. masing-masing orang di suatu negara belum tentu memiliki penghasilan yang sama
  - b. indikator tersebut memfokuskan pada masalah inti (*raison d'etre*) dari pembangunan, yaitu kenaikan tingkat hidup dan menghilangkan kemiskinan sehingga pendapatan per kapita bukanlah suatu *proxy* yang buruk dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat
  - c. pertumbuhan penduduk biasanya lambat sehingga tingkat pendapatan per kapita bisa digunakan dalam waktu yang cukup lama
  - d. pembangunan bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja namun harus pula disertai perubahan sikap dan tingkah laku

- 4) Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat ....
- pribadi
  - umum
  - objektif
  - subjektif
- 5) Nordhaus dan Tobin (1972) mencoba untuk menyempurnakan nilai-nilai GNP dalam upaya untuk memperoleh suatu indikator yang lebih baik dengan melakukan koreksi positif dan koreksi negatif. Hal-hal yang termasuk koreksi positif menurut mereka ....
- perlunya diperhitungkan nilai waktu senggang
  - masalah eksternalitas
  - biaya sosial
  - pencemaran lingkungan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
 80 - 89% = baik  
 70 - 79% = cukup  
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) D
- 2) C
- 3) D
- 4) D
- 5) C

### *Tes Formatif 2*

- 1) A
- 2) A
- 3) D
- 4) A
- 5) A

### *Tes Formatif 3*

- 1) D
- 2) D
- 3) B
- 4) D
- 5) A

## Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln. (1999). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Cypher, James M. & James L. Dietz. (1997). *The Process of Economic Development*. New York: Routledge Publisher.
- Goulet, Dennis. (1971). *The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development*. New York: Atheneum.
- Meier, Gerald M. & James E. Rouch (eds.). (2000). *Leading Issues in Economic Development*. Seventh Edition. New York: Oxford University Press.
- Meier, Gerald M. & Joseph E. Stiglitz (eds.). (2001). *The Frontiers of Development Economics: The Future in Perspective*. New York: Oxford University Press.
- North, Douglass C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Streeten, Paul. (1972). *The Frontiers of Development Studies*. New York: John Wiley & Sons.
- Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. (2003). *Economic Development*. Eight Edition. England: Pearson Education Limited.
- UNDP. (2008). *Capacity Development: Empowering People and Institutions. UNDP Annual Report*. United Nations Development Programme.
- Van den Berg, Henrik. (2005). *Economic Growth and Development*. Singapore: McGraw-Hill.
- World Bank. (2009). *World Development Report 2009*. Oxford: Oxford University Press.